

**PELAKSANAAN WAWASAN KEBANGSAAN DI KALANGAN PESERTA DIDIK
(STUDI DI SATUAN PENDIDIKAN SMA NEGERI 10 MAKASSAR)**

ISMAYATI ANUGRAH

Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Makassar
nunhuisma@gmail.com

ABSTRAK

Ismayati Anugrah. 2020. “Wawasan kebangsaan di Kalngan Peseerta Didik (Studi di Satuan Pendidikan SMAN 10 Makassar)”. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Jurusan Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan. Universitas Negeri Makassar. Dibimbing oleh Bapak Imam Suyitno dan Mustari. 89 Halaman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Tingkat atau derajat wawasan kebangsaan di kalangan peserta didik SMA Negeri 10 Makassar, (2) Proses integrasi wawasan kebangsaan ke dalam kegiatan pembelajaran di SMA Negeri 10 Makassar, dan (3) Kendala yang ditemukan dalam proses integrasi wawasan kebangsaan di SMA Negeri 10 Makassar. Jenis penelitian ini yaitu menggabungkan penelitian kualitatif dengan kuantitatif (mix method), menggunakan pendekatan deskriptif. Adapun sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data meliputi: Angket, Wawancara dan Dokumentasi. Data yang diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis presentase dan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (i) Tingkat wawasan kebangsaan di kalangan peserta didik SMA Negeri 10 Makassar rata-rata berada pada derajat “baik”. (ii). Integrasi wawasan kebangsaan diinternalisasikan kedalam kebijakan program sekolah baik berupa : penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya di awal pembelajaran dan lagu Syukur di akhir jam pelajaran di sekolah, peringatan upacara bendera setiap hari Senin, dan peringatan upacara hari-hari besar nasional. (iii) Kendala integrasi wawasan kebangsaan masih dijumpai baik dalam hak penerapan kebijakan sekolah di satuan pendidikan SMA Negeri 10 Makassar seperti : pengggunaan bahasa ibu/daerah yang masih kuat, kelompok pertemanan yang belum terbuka. Sedangkan kendala dalam kegiatan pembelajaran di kelas oleh guru mata pelajaran PPKn seperti : ketelitian yang tinggi dalam memilih bahan ajar, pemilihan strategi penyampaian materi yang tepat, dan pemilihan metode yang tepat.

PENDAHULUAN

Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warganegara yang demokratis serta bertanggung jawab.¹ Sebagai konsekwensi logisnya adalah melalui pendidikan hendak diwujudkan manusia yang memiliki berbagai kecerdasan, baik kecerdasan spiritual, emosional, sosial, intelektual maupun kecerdasan kinestika. Pendidikan nasional mempunyai tujuan mulia terhadap individu peserta didik, yakni membangun pribadi yang memiliki ilmu pengetahuan, meningkatkan kemampuan teknis, mengembangkan kepribadian yang kokoh dan membentuk karakter yang kuat antara lain memiliki kesadaran, semangat dan komitmen kebangsaan sebagai perwujudan nilai dan moral Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, semangat bhineka tunggal ika, dan komitmen terhadap negara kesatuan republik Indonesia.

Mencermati perkembangan dewasa terutama pasca pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden tahun 2018. Isu mengenai pertikaian, perpecahan dan konflik di tengah masyarakat begitu santer terdengar, dimulai dari skala kecil (perorangan), kelompok, bahkan mengarah ke golongan/komunitas.²

Gejala ini terjadi baik pada tataran lokal (kedaerahan) seperti konflik, ini semua merupakan indikasi adanya permasalahan dan perseteruan banyak kalangan yang memberi kesan seakan-akan bangsa sedang mengalami kritis etika dan kepercayaan diri yang berkepanjangan. Bubarnya Uni Soviet sebagai salah satu Negara adi daya (super power) dalam perang dingin di penghujung abad XX, disinyalir juga karena meredupnya wawasan kebangsaan di antara komponen bangsa tersebut dan tumbuh suburnya paham pemikiran sempit yang lebih mementingkan kepentingan kelompok, dan golongan tertentu, serta cenderung hanya mencakup jangka pendek.³

Tidaklah berlebihan bila dewasa ini isu wawasan kebangsaan dinilai mendesak untuk dimiliki oleh setiap peserta didik, guna menyiapkan calon pemimpin di masa depan.⁴

Hasil pengamatan terhadap penerapan pendidikan karakter di satuan pendidikan SMA/SMK/MA sebagai wujud pengembangan wawasan kebangsaan selama ini sesungguhnya telah berjalan, namun belum terprogram secara sistematis, sehingga belum/tidak memiliki efek yang signifikan secara nasional. Namun demikian implementasi pendidikan karakter di lapangan utamanya satuan pendidikan SMA tetaplah dipandang fungsional. Sebab dengan penerapan pendidikan karakter tersebut dapat menjadi modal dasar dalam membangkitkan wawasan kebangsaan di kalangan peserta didik, utamanya peserta didik di SMA/ sederajat.

Membangun wawasan kebangsaan dalam membentuk karakter warga negara yang baik memerlukan usaha yang sungguh-sungguh dan membutuhkan waktu yang panjang, mengingat karakter

¹ <http://ditjenpp.kemendiknas.go.id/arsip/In/2003/uu20-2003.pdf>. Diakses Pada tanggal 31 Januari 2020 Jam 13:33.

² Dr. Ali Masykur Musa. 2011. *"Nasionalisme Di Persimpangan"*. Cetakan I. Jakarta : Penerbit Erlangga, Hal. 23.

³ Azra, Azyumardi. 2003. "Demokrasi HAM Dan Masyarakat Madani". Cetakan . Jakarta : Penerbit Permata Media, hal.

⁴ Imam Suyitno. 2010. "Strategi Pembelajaran Berbasis Metakognisi Pada Mata Pelajaran Kelompok Ilmu Sosial Di SMA

bangsa merupakan salah satu masalah serius yang dihadapi masyarakat dan negara Indonesia. Hal ini ditandai dengan semakin maraknya kasus korupsi bahkan telah menyentuh dan menjadi the way of live bangsa Indonesia.⁵

Pendidikan wawasan kebangsaan dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran dan wawasan peserta didik akan satu hak, dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam menjauhkan diri dari praktek korupsi, serta peningkatan kualitas dirinya sebagai manusia. Selain itu perlu pula ditanamkan kesadaran wawasan kebangsaan, jiwa patriotisme dan bela negara, penghargaan terhadap hak asasi manusia, kemajemukan bangsa, pelestarian lingkungan hidup, kesetaraan gender, demokrasi, tanggungjawab sosial, ketaatan pada hukum, ketaatan membayar pajak, dan sikap serta perilaku anti korupsi, kolusi, dan nepotisme.

SMA Negeri 10 Makassar dipilih sebagai lokasi penelitian dengan pertimbangan bahwa sekolah tersebut ditetapkan pemerintah daerah Sulawesi Selatan sebagai sekolah tingkat SMA rujukan Sulawesi Selatan.⁶ Ditetapkannya sekolah tersebut sebagai sekolah rujukan tidak terlepas dari adanya beberapa keunggulan/kelengkapan baik sarana dan prasarana, juga adanya komitmen yang kuat dari warga belajarnya, untuk menjadikan sekolah ini unggul dalam proses pembelajaran, dan luarannya.

Pengamatan awal yang dilakukan terhadap aspek wawasan kebangsaan mengenai pandangan/orientasi terhadap kepentingan bangsa dan negara dibandingkan kelompok dan golongan dinilai masih belum memadai.⁷

Demikian halnya terhadap penilaian mereka atas masalah bangsa yang menjangkau jangka panjang, menengah, pendek. Umumnya mereka cenderung memilih hal-hal yang berorientasi jangka pendek.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Kebinekaan atau pluralisme bangsa Indonesia

Bangsa Indonesia yang menghuni Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah sebuah bangsa yang besar. Negara dengan jumlah penduduk ± 212.000.000 orang ini merupakan negara kepulauan yang terbesar di dunia. Kondisi geografis yang sangat menguntungkan bangsa ini diperindah lagi dengan keanekaragaman suku, etnis, agama, bahasa dan adat istiadat, namun sangat rentan terhadap perpecahan jika tidak dikelola dengan baik.⁸ Oleh karena itu dalam pengelolaan sebuah "negara bangsa" diperlukan suatu cara pandang atau wawasan yang berorientasi kebangsaan (wawasan kebangsaan), yang sekaligus menjadi kesepakatan bersama.

Analisis banyak kalangan yang melihat perkembangan politik, sosial, ekonomi dan budaya di Indonesia sudah sangat memprihatinkan. Bahkan kekuatiran itu menjadi semakin nyata ketika mengamati pada apa yang dialami oleh setiap warganegara, yakni mudarnya wawasan kebangsaan. Dan yang lebih menyedihkan lagi adalah adanya kecenderungan kita kehilangan wawasan tentang makna hakekat bangsa dan kebangsaan yang akan mendorong terjadinya disorientasi dan perpecahan.⁹

⁵ Departemen pendidikan dan Kebudayaan 2010, Bahan penataran Dosen Pendidikan dan Kewarganegaraan

⁶ Dokumentasi SMA Negeri 10 Makassar tahun 2018.

⁷ Hasil Observasi Awal Di Sekolah Terhadap Peserta Didik Yang Terbatas, Januari 2020

⁸ Dr. Ali Masykur Musa. 2011. "Nasionalisme Di Persimpangan". Cetakan I. Jakarta : Erlangga, Hal. 23.

⁹ Triyono lambang. 1996. "Globalisasi Modernitas Dan Krisis Negara Bangsa: Tantang Integritas Nasional Dalam Konteks Global". Cetakan 1. Jakarta : Penerbit CSIS, Hal. 50

Pandangan di atas sungguh wajar dan tidak mengada-ada. Risis yang dialami oleh bangsa Indonesia ini menjadi sangat multi dimensional yang saling mengait. Krisis ekonomi yang tidak kunjung henti berdampak pada krisis sosial dan politik, yang pada perkembangannya justru menyulitkan upaya pemulihan ekonomi. Konflik horizontal dan vertikal yang terjadi dalam kehidupan sosial merupakan salah satu akibat dari semua krisis yang terjadi, yang tentu akan melahirkan ancaman dis-integrasi bangsa. Apalagi bila melihat bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang plural seperti beragamnya suku, budaya daerah, agama, dan berbagai aspek politik lainnya, serta kondisi geografis negara kepulauan yang tersebar. Semua ini mengandung potensi konflik (latent sosial conflict) yang dapat merugikan dan mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa.

Hingga kini dampak krisis multi-dimensional ini telah memperlihatkan tanda-tanda awal munculnya krisis kepercayaan diri (self-confidence crisis) dan rasa hormat diri (self-esteem crisis) sebagai bangsa. Krisis kepercayaan sebagai bangsa dapat berupa keraguan terhadap kemampuan diri sebagai bangsa untuk mengatasi persoalan-persoalan mendasar yang terus-menerus datang, seolah-olah tidak ada habis-habisnya mendera Indonesia.¹⁰ Aspirasi politik untuk merdeka di berbagai

daerah, misalnya, adalah salah satu manifestasi wujud krisis kepercayaan diri sebagai satu bangsa, satu "nation". Di samping itu, timbul pertanyaan mengapa akhir-akhir ini wawasan kebangsaan menjadi banyak dipersoalkan. Apabila kita coba mendalaminya, menangkap berbagai ungkapan masyarakat, terutama dari

kalangan cendekiawan dan pemuka masyarakat, memang mungkin ada hal yang menjadi keprihatinan. Pertama, ada kesan seakan-akan semangat kebangsaan telah menjadi dangkal atau tererosi terutama di kalangan generasi muda—seringkali disebut bahwa sifat materialistik mengubah idealisme yang merupakan jiwa kebangsaan. Kedua, ada kekuatiran ancaman disintegrasi bangsa, dengan melihat gejala yang terjadi di berbagai daerah, terutama yang amat mencekam adalah pertikaian yang terjadi di Ambon, Aceh, Papua dan Poso, dimana terdapat kecenderungan paham kebangsaan merosot menjadi paham kesukuan atau keagamaan. Ketiga, ada keprihatinan tentang adanya upaya untuk melarutkan pandangan hidup bangsa ke dalam pola pikir yang asing untuk bangsa ini.

2. Pentingnya wawasan kebangsaan

Menyimak keadaan Wawasan Kebangsaan Indonesia pada rakyat kita khususnya di kalangan mahasiswa yang sangat memprihatinkan saat ini, sepatutnya bangsa ini sepakat untuk memantapkan kembali nilai-nilai kebangsaan yang sudah longgar itu. Kita perlu suatu landasan yang kuat dan konsepsional untuk membangun kembali persatuan dan kesatuan bangsa serta jiwa nasionalisme yaitu "Wawasan Kebangsaan".

Membahas Wawasan Kebangsaan, harus dimulai dari nilai-nilai yang dibangun oleh para pendahulu dan pendiri bangsa ini. Mereka telah menanamkan nilai-nilai persatuan dengan mencetuskan "Sumpah Pemuda" yang kemudian menjadi embrio dari Wawasan Kebangsaan yaitu : Satoe Noesa, Satoe Bangsa dan Satoe Bahasa, yaitu Indonesia. Makna dari Wawasan Kebangsaan memang belum begitu populer dalam kehidupan masyarakat kita, sehingga sampai saat ini belum ada

¹⁰ Yanuarti, Jurnal Ilmu Politik, 2009

rumusan yang baku tentang Wawasan Kebangsaan itu, mengingat sifatnya abstrak dan dinamis.

Di samping itu, timbul pertanyaan mengapa akhir-akhir ini wawasan kebangsaan menjadi banyak dipersoalkan. Apabila kita coba mendalaminya, menangkap berbagai ungkapan masyarakat, terutama dari kalangan cendekiawan dan pemuka masyarakat, memang mungkin ada hal yang menjadi keprihatinan.

Pada lingkungan internasional, fenomena yang muncul adalah isu-isu global yang memuat nilai-nilai universal dan mengungguli nilai-nilai nasional. Nilai-nilai universal tersebut bahkan sengaja dipaksakan kepada negara tertentu oleh negara-negara yang mengklaim dirinya sebagai negara yang paling menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut.

3. Wawasan kebangsaan sebagai “nation and character building”

Setiap orang tentu memiliki rasa kebangsaan dan memiliki wawasan kebangsaan dalam perasaan atau pikiran, paling tidak di dalam hati nuraninya. Dalam realitas, rasa kebangsaan itu seperti sesuatu yang dapat dirasakan tetapi sulit dipahami. Namun ada getaran atau resonansi dan pikiran ketika rasa kebangsaan tersentuh. Rasa kebangsaan bisa timbul dan terpendam secara berbeda dari orang per orang dengan naluri kejuangannya masing-masing, tetapi bisa juga timbul dalam kelompok yang berpotensi dahsyat luar biasa kekuatannya.

Rasa kebangsaan adalah kesadaran berbangsa, yakni rasa yang lahir secara alamiah karena adanya kebersamaan sosial yang tumbuh dari kebudayaan, sejarah, dan aspirasi perjuangan masa lampau, serta kebersamaan dalam menghadapi tantangan sejarah masa kini. Dinamisasi rasa kebangsaan ini dalam mencapai cita-cita

bangsa berkembang menjadi wawasan kebangsaan, yakni pikiran-pikiran yang bersifat nasional dimana suatu bangsa memiliki cita-cita kehidupan dan tujuan nasional yang jelas. Berdasarkan rasa dan paham kebangsaan itu, timbul semangat kebangsaan atau semangat patriotism.

Wawasan kebangsaan mengandung pula tuntutan suatu bangsa untuk mewujudkan jati diri, serta mengembangkan perilaku sebagai bangsa yang meyakini nilai-nilai budayanya, yang lahir dan tumbuh sebagai penjelmaan kepribadiannya. Rasa kebangsaan bukan monopoli suatu bangsa, tetapi ia merupakan perekat yang mempersatukan dan memberi dasar keberadaan (*raison d’être*) bangsa-bangsa di dunia. Dengan demikian rasa kebangsaan bukanlah sesuatu yang unik yang hanya ada dalam diri bangsa kita karena hal yang sama juga dialami bangsa-bangsa lain.

4. Wawasan kebangsaan dalam perspektif teori sistem

Dengan melakukan adopsi pemikiran Talcott Parsons,¹¹ mengenai teori sistem, wawasan kebangsaan dapat dipandang sebagai suatu falsafah hidup yang berada pada tataran sub-sistem budaya. Dalam tataran ini wawasan kebangsaan dipandang sebagai “way of life” atau merupakan kerangka/peta pengetahuan yang mendorong terwujudnya tingkah laku dan digunakan sebagai acuan bagi seseorang untuk menghadapi dan menginterpretasi lingkungannya. Jelaslah, bahwa wawasan kebangsaan tumbuh sesuai pengalaman yang dialami oleh seseorang, dan pengalaman merupakan akumulasi dari proses tataran sistem lainnya, yakni sub-sistem sosial, sub-sistem ekonomi, dan sub-sistem politik. Pada ranah sosial berlangsung suatu proses interaksi sosial yang menghasilkan kohesi sosial yang kuat, hubungan antar individu,

¹¹ Alfian & Nazaruddin Syamsuddi, 1988. “Masa Depan Kehidupan Politik Di Indonesia”. Cetakan I. Jakarta : Penerbit Rajawali Pers, Hal. 32.

antar kelompok dalam masyarakat yang harmonis. Integrasi dalam sistem sosial yang terjadi akan sangat mewarnai dan mempengaruhi bagaimana sistem budaya (ideology/falsafah/pandangan hidup) dapat bekerja dengan semestinya.

Ranah ekonomi dan ranah sistem politik mempunyai kaitan yang sangat erat. Ada yang mengatakan bahwa paham kebangsaan Indonesia tidak menempatkan bangsa kita di atas bangsa lain, tetapi menghargai harkat dan martabat kemanusiaan serta hak dan kewajiban manusia. Paham kebangsaan berakar pada asas kedaulatan yang berada di tangan rakyat.

Oleh karena itu paham kebangsaan sesungguhnya adalah paham demokrasi yang memiliki cita-cita keadilan sosial, bersumber pada rasa keadilan dan menghendaki kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Namun demikian sangat dipahami bahwa pembangunan ekonomi bukan semata-mata proses ekonomi, tetapi suatu penjelamaan dari proses perubahan politik dan sosial. Oleh karena itu keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi tidak dapat lepas dari keberhasilan pembangunan di bidang politik. Pada masa kini kita menyaksikan betapa pembangunan ekonomi hanya dapat terjadi secara berkelanjutan di atas landasan demokrasi. Betapa bangsa yang menganut sistem politik totaliter, dengan atau tanpa ideologi, atau dilandasi oleh ideologi apapun, tidak bisa mewujudkan kesejahteraan dan tidak sanggup memelihara momentum kemajuan yang telah dicapai. Sejarah membuktikan keikutsertaan rakyat dalam pengambilan keputusan merupakan prasyarat bagi peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan.

Di sisi lain, ada pula yang mengatakan proses demokratisasi tidak akan berlangsung dengan sendirinya tanpa faktor-faktor yang mengkondisikannya.

Dalam hal ini tingkat kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh akan menentukan kualitas demokrasi. Masyarakat yang belum terpenuhi kebutuhan hidupnya yang paling mendasar akan sulit dibayangkan dapat ikut mempengaruhi secara aktif proses perumusan kebijaksanaan pada tingkat mana pun, faktor ekonomi sangat menentukan. Dengan demikian, tingkat partisipasi politik rakyat sangat erat kaitannya dengan tingkat kemajuan ekonominya. Jalan menuju demokrasi adalah pembangunan ekonomi, seperti juga jalan menuju pembangunan ekonomi adalah demokrasi.

Ekonomi yang kuat yang antara lain tercermin pada tingkat pendapatan per kapita dan tingkat pertumbuhan yang tinggi belum menjamin terwujudnya demokrasi yang sehat apabila struktur ekonomi pincang dan sumber-sumber daya hanya terakumulasi pada sebagian sangat kecil anggota masyarakat. Dengan demikian, upaya-upaya pemerataan pembangunan yang sekarang diberikan perhatian khusus harus dipandang pula sebagai langkah strategis dalam rangka pengejawantahan dari wawasan kebangsaan.

Dapat dipahami bila wawasan kebangsaan hanya tumbuh dan dapat diwujudkan dengan energi yang diberikan oleh sub sistem lainnya.¹²

Sub-sistem politik akan memberikan energi kepada bekerjanya sub-sistem ekonomi, untuk kemudian memberikan energi bagi sub-sistem sosial dan pada akhirnya kepada sub-sistem budaya.

Sub-sistem Politik merupakan prasyarat atau prakondisi bagi terciptanya atau bekerja sub-sistem ekonomi. Pada sub-sistem politik, pencapain tujuan

¹² Culla, Adi Suryadi. 1999. "Masyarakat Madani". Cetakan I. Jakarta : Penerbit Raja Grafindo Pusada, Hal. 25.

dilaksanakan melalui demokrasi yang mengedepankan keseimbangan hak dan kewajiban warga negara, menghargai perbedaan dan sebagainya. Di kalangan ilmu politik, tujuh kriteria Robert Dahl, juga banyak dikenal, yaitu (1) pengawasan atas kebijaksanaan pemerintah dilakukan secara konstitusional oleh wakil-wakil yang dipilih, (2) wakil-wakil rakyat itu dipilih dalam pemilihan yang dilakukan secara jujur dan tanpa paksaan, (3) semua orang dewasa berhak memilih, (4) semua orang dewasa juga berhak dipilih, (5) setiap warga negara berhak menyatakan pendapat mengenai masalah-masalah politik tanpa ancaman hukuman, (6) setiap warganegara berhak memperoleh sumber-sumber informasi alternatif, yang memang ada dan dilindungi oleh hukum, dan (7) setiap warga negara berhak membentuk perkumpulan atau organisasi yang relatif independen, termasuk partai politik dan kelompok kepentingan.

Secara ringkas persamaan di atas dapat dijelaskan bahwa pertambahan yang dapat dicapai pada pertumbuhan ekonomi sesungguhnya sangat tergantung pada upaya pemberdayaan ekonomi dan interaksi antara peranan kelembagaan untuk mengatasi konflik sosial yang terjadi. Peranan kelembagaan dapat dijelaskan antara lain dengan eksistensi birokrasi yang bersih, bebas KKN, pranata hukum yang berwibawa dengan penegakan hukum yang konsisten dan sebagainya. Sementara itu, latent social conflict dapat dijelaskan antara lain dengan besarnya ketidak-merataan (inequality) yang terjadi di dalam masyarakat. Di samping itu pluralitas seperti beragamnya suku, budaya daerah, agama, dan berbagai aspek politik lainnya, serta kondisi geografis negara kepulauan yang tersebar, juga merupakan bagian dari latent social conflict.

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah

pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan cara-cara kuantifikasi.¹³ Penelitian kualitatif merujuk pada semua jenis penelitian yang tidak menggunakan prosedur statistik dalam menghasilkan temuan.¹⁴ Pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau membahas obyek penelitian tentang Wawasan Kebangsaan di Kalangan Peserta Didik SMA Negeri 10 Makassar.

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif, yakni mendeskripsikan atau menggambarkan sekaligus menjawab pertanyaan yang diajukan dalam permasalahan penelitian, dengan menggunakan prosedur atau langkah-langkah tertentu.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini memilih lokasi di satuan pendidikan SMA Negeri 10 Makassar. Pemilihan lokasi dilakukan atas pertimbangan bahwa sekolah tersebut merupakan sekolah tingkat SMA yang ditetapkan oleh Pemerintah Propinsi dalam hal ini Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan sebagai sekolah rujukan sejak tahun 2018 hingga kini. observasi awal peneliti melihat bahwa sebagian besar masyarakat desa ini pekerjaan utamanya adalah sebagai petani.

Dari hasil observasi awal yang dilakukan, didapatkan data mata pencaharian penduduk desa Lantang dari pihak sekretaris Desa Lantang bahwa dari jumlah keseluruhan Kartu keluarga 1170

¹³ M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur. 2017. "Metode Penelitian Kualitatif". Cetakan II. Jogjakarta : AR-RUZZ MEDIA

¹⁴ Haryanto Atmowardoyo. 2008. "Metode Penelitian Kualitatif : Teori Dasar. Cetakan I. Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar

dengan angka penduduk sebanyak 4085 jiwa, sebanyak 3829 Orang melakukan usaha tani, dan 256 Orang bekerja profesi lain.

Hampir di sepanjang jalan desa ini dapat dilihat lahan pertanian atau sawah yang terbentang luas. dalam setahun sebagian besar lahan pertanian itu bisa di tanami padi tiga kali, dan sebagian lahan yang agak jauh dari sumber air ditanami padi dua kali dalam setahun dan pada musim kemarau ditanami tanaman lain yang tidak terlalu banyak membutuhkan air dan jangka waktu panennya tidak terlalu lama seperti kacang hijau, kacang tanah, jagung, dan kedelai.

Melihat kondisi masyarakat yang sangat menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, hal inilah yang membuat calon peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait perlindungan dan pemberdayaan petani dan memilih lokasi ini sebagai lokasi penelitian, yang difokuskan pada kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan petani dalam mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki para petani di desa ini.

A. Tahap-Tahap Kegiatan Penelitian

Ada 3 tahap dalam penelitian ini yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, dan laporan penelitian.

1. Perencanaan

Langkah-langkah penelitian yang termasuk dalam perencanaan adalah

- a. Penentuan atau pemilihan masalah
- b. Latar belakang
- c. Penentuan Rumusan masalah
- d. Tujuan dan manfaat penelitian
- e. Tinjauan pustaka dan kerangka konsep

Pada dasarnya hasil dari tahap perencanaan ini adalah penelitian yang sistematis penulisannya mencakup langkah diatas, penulisan rancangan penelitian ini harus:

- a. Mencakup kegiatan yang dilakukan

- b. Menuruti susunan yang tersistematika dan logis
 - c. Membatasi hal-hal yang tidak diperlukan
 - d. Memberikan hasil yang dicapai
- ##### **2. Tahap Pelaksanaan**

Dalam tahap ini ada empat langkah yang harus dilakukan, yaitu:

- a. Pengumpulan data
 - b. Pengolahan data
 - c. Analisis data
 - d. Penafsiran hasil penelitian
- ##### **3. Tahap Hasil Laporan**

Penulisan hasil laporan harus memperhatikan seperti keabsahan data, penggunaan tanda baca yang benar, bentuk dan isi laporan, serta penyusunan ketahap skripsi.

HASIL PENELITIAN

1. Tingkat wawasan kebangsaan di kalangan peserta didik SMA Negeri 10 Makassar rata-rata berada pada derajat “baik” atau pada level angka 3,09. Sementara itu untuk indikator rasa kebangsaan menunjukkan tingkatan “baik” atau pada level angka 3,1. Indikator paham kebangsaan menunjukkan tingkatan “sangat baik: atau pada level angka 3,32. Indikator semangat kebangsaan menunjukkan tingkatan “baik” atau pada level angka 2,81. Indikator tekad kebangsaan menunjukkan tingkatan “baik” atau pada level 3,15.

2. Integrasi wawasan kebangsaan diinternalisasikan kedalam kebijakan program baik berupa : penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya di awal pembelajaran dan lagu Syukur di akhir jam pelajaran sekolah, peringatan upacara bendera setiap hari Senin, dan peringatan upacara hari-hari besar nasional. Sedangkan Integrasi wawasan kebangsaan dalam proses pembelajaran mata pelajaran PPKn disisipkan pada kompetensi dasar dan materi pembelajaran yang relevan, Disamping itu juga dilakukan analisis

kasus yang terkait dengan wawasan kebangsaan dewasa ini.

3. Kendala integrasi wawasan kebangsaan masih dijumpai baik dalam hal penerapan kebijakan sekolah di satuan pendidikan SMA Negeri 10 Makassar, maupun dalam kegiatan pembelajaran di kelas oleh guru mata pelajaran PPKn.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat wawasan kebangsaan di kalangan peserta didik SMA Negeri 10 Makassar rata-rata berada pada derajat “baik”. Sementara itu untuk indikator rasa kebangsaan menunjukkan tingkatan “baik”. Kemudian Indikator paham kebangsaan menunjukkan tingkatan “sangat baik. selanjutnya Indikator semangat kebangsaan menunjukkan tingkatan “baik”. Dan indikator tekad kebangsaan menunjukkan tingkatan “baik”.
2. Integrasi wawasan kebangsaan diinternalisasikan kedalam kebijakan program baik berupa : penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya di awal pembelajaran dan lagu Syukur di akhir jam pelajaran sekolah, peringatan upacara bendera setiap hari Senin, dan peringatan upacara hari-hari besar nasional. Sedangkan Integrasi wawasan kebangsaan dalam proses pembelajaran mata pelajaran PPKn disisipkan pada kompetensi dasar dan materi pembelajaran yang relevan, Disamping itu juga dilakukan analisis kasus yang terkait dengan wawasan kebangsaan dewasa ini.
3. Kendala integrasi wawasan kebangsaan masih dijumpai baik dalam hal penerapan kebijakan sekolah di satuan pendidikan SMA Negeri 10 Makassar, maupun dalam kegiatan pembelajaran di kelas oleh guru mata pelajaran PPKn.

SARAN

1. Untuk meningkatkan derajat/indeks wawasan kebangsaan selain diintegrasikan ke dalam kegiatan pembelajaran (kurikuler), disarankan juga diintegrasikan ke dalam kegiatan ekstra kurikuler seperti kepramukaan, palang merah remaja, lomba karya ilmiah remaja, dan lain-lain
2. Diperlukan kreativitas guru mata pelajaran PPKn dalam memvariasikan materi ajar wawasan kebangsaan, agar penanaman nilai dan sikap wawasan kebangsaan efektif dirasakan oleh peserta didik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adisusilo, Sutarjo, 2012. *Pembelajaran Nilai-Nilai Karakter*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Almanshur Fauzan, Ghony M. Djunaidi. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA
- Azra, Azyumardi. 2003. *Demokrasi HAM dan masyarakat Madani (pengantar)*, Jakarta, Permata Media.
- Alfian dan Nazaruddin Syamsuddi, 1988. *Masa Depan Kehidupan Politik di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Culla, Adi Suryadi 1999. *Masyarakat madani*. Jakarta, Raja Grafindo Pusada
- Danim, Sudarwan, 2002, *Inovasi Pendidikan Dalam Upaya Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kependidikan*, Bandung, Pustaka setia.
- Departemen pendidikan dan Kebudayaan 2010, *Bahan penataran Dosen Pendidikan dan Kewarganegaraan*.

- Direktorat Pendidikan Menengah Umum,
Ditjen. Disdakmen, Depdiknas,
2004, Kurikulum 2004 SMA
*Pedoman Khusus pengembangan
silabus dan penilaian*, Jakarta
- Dirjen Dikti, Kementerian Pendidikan
Nasional 2011, *Grand Desain
Pendidikan Karakter (Pendikar) di
Perguruan Tinggi*, Jakarta.
- Djunaidi M. Ghony & Fauzan Almanshur.
2017. "*Metode Penelitian
Kualitatif*". Cetakan II. Jogjakarta :
AR-RUZZ MEDIA
- Fattah, Nanang. 2001, *landasan
Manajemen Pendidikan*, Bandung,
Rosdakarya.
- Hadiyanto, 2004, *Mencari Sosok
Desentralisasi Pendidikan, gagasan,
Aplikasi, dan Tantangannya*, Manado,
Media Pustaka.
- J.A. Denny. 1999 *Catatan Politik*, Jakarta,
jayabaya University Press.
- Kementerian Pendidikan Nasional, 2011,
*Naskah Akademik Pendidikan
Karakter di Perguruan Tinggi*,
Direktorat Jenderal Pendidikan
Tinggi.
- Masykur Musa, Ali, 2011, *Nasionalisme di
Persimpangan*, Jakarta, Erlangga.
- Proyek Peningkatan Tenaga Akademik,
Dirjen Dikti Depdiknas. 2002,
*Kapita Selekta Pendidikan
Pancasila (Untuk mahasiswa)*
Jakarta.
- _____, 2002, *Kapita Selekta
Pendidikan Kewarganegaraan
(untuk mahasiswa)*, Jakarta.
- Rosyada, Dede. 2004, *Reformasi
Pendidikan Demokratis*, Jakarta,
Prenada Media.
- Suryadi, Ace dan Budimansyah, Dasim.
2004 *Pendidikan Nasional menuju
Masyarakat Indonesia Baru*,
Jakarta, Ganesindo.
- Sudjana, D. 2000. *Manajemen Program
Pendidikan*, Bandung, Falah
Production.
- Suyitno, Imam, 2009-2010, *Strategi
Pembelajaran Berbasis
Metakognisi Pada Mata Pelajaran
Kelompok Ilmu Sosial di SMA*,
Penelitian Hibah Bersaing tahun 1
dan 2.
- Tilaar, H. A. R. 2000. *Paradigma Baru
Pendidikan Nasional*. Jakarta,
Rineka Cipta.
- _____, 2001. *Manajemen
Pendidikan Nasional*, Bandung,
Rosda Karya.
- _____, 2002. *Membenahi
Pendidikan Nasional*, Jakarta,
Rineka Cipta.
- Triyono, Lambang, 1996. *Globalisasi
Modernitas dan Krisis Negara
Bangsa : Tantangan Integritas
Nasional dalam Konteks Global*,
Jakarta, CSIS.
- Winarno, 2013. *Pembelajaran Pendidikan
Kewarganegaraan*, Jakarta, Bumi
Aksara.
- Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang No 19 Tahun 2013
tentang Perlindungan dan Pemberdayaan
Petani Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 nomor 131.
- Jurnal/Internet**
- Jurnal Ilmu Politik, No. 9/2009, Jakarta

Jurnal Supremasi, No. IV/2010. UNM
Makassar

INTERNET

1. Sistem Pendidikan Nasional

<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2003/uu20-2003.pdf>

2. Pertahanan Negara

http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_3_02.htm